

PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Sri Asyrafil Mustaqmah 1), Dian Perdana Putri 2)

Email : 1 mustaqmah09@gmail.com

2 dianperdanaputri@gmail.com

Institut Teknologi & Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Indonesia

ABSTRACT : This study aims to determine how the influence of human resource capacity, utilization of local government information systems, regional management information systems on the quality of financial reports in the local government of Bukittinggi City. This research was conducted at the Local Government Organization of the City of Bukittinggi. The research method used is quantitative data analysis. The sampling technique used was purposive sampling technique, namely 28 Regional Apparatus Organizations of Bukittinggi City. The research target population is the Head of the Planning and/or Finance Subdivision, Financial Administration Staff and Expenditure Treasurer in each Regional Apparatus, so that the number of samples is 82 respondents. The method of data collection was done by questionnaire. multiple regression analysis using the Smart PLS program. The results showed that human resource capacity, utilization of local government information systems had a positive and significant effect on the quality of financial reports, while it had no positive and insignificant effect on the Quality of Financial Reports in the Bukittinggi City Government.

Keywords: Human resource capacity, Utilization of local government information systems, Regional management information systems, Financial reports

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah, sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kota Bukittinggi. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yakni 28 Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi. Populasi target penelitian adalah Kasubbag Perencanaan dan atau Keuangan, Staf Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di masing-masing Perangkat Daerah, sehingga jumlah sampel menjadi 82 responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. analisis regresi berganda dengan menggunakan program Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi

Kata Kunci : *Kapasitas sumber daya manusia, Pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah, Sistem informasi manajemen daerah, Laporan keuangan*

A. PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu, laporan yang disajikan diharapkan mempunyai kualitas yang bagus. Apabila laporan tersebut tidak memadai, maka akan berakibat terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan, yang akan berdampak pada kerugian daerah, berkurangnya potensi daerah, sedikit pemasukan, lemah administrasi, tidak efisien dan efektifnya

sumber daya. Mengingat semakin banyaknya tuntutan terhadap akuntabilitas laporan keuangan atas lembaga publik, di pusat maupun daerah. Salah satu bentuk akuntabilitas, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan. Informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah, sangat diperlukan oleh berbagai pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Apabila informasi di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporannya. Dapat dilihat dari opini Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK) RI. Semenjak tahun 2015 sampai dengan 2019 untuk lima tahun berturut-turut Kota Bukittinggi telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tapi masih memiliki kekurangan dalam hal penyampaian Laporan Keuangan tersebut. Kota Bukittinggi baru dapat memberikan Laporan Keuangan pada batas akhir penyampaian laporan keuangan yaitu pada bulan Maret untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 mengenai ketentuan implementasi dari penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyediakan informasi berupa penggolongan atau pengelompokkan kegiatan, pemberian kode akun belanja dan daftar nama menuju satu kode untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pertanggungjawaban serta proses pelaporan keuangan.

Dengan adanya standarisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan konsep good governance. Namun permasalahan yang terjadi dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 ini, apakah setiap daerah telah siap untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah itu yaitu menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), mengingat aplikasi ini baru dan harus digunakan pada tahun 2021 yang belum ada bimbingan teknis untuk aplikasi ini dan juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 ini untuk nama program, kegiatan, sub kegiatan hingga sampai ke rincian belanja harus disesuaikan dengan nomenklatur baru yang telah ditetapkan. Namun kendalanya pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini baru dimanfaatkan untuk tahap perencanaan dan penganggaran, dan untuk penatausahaan dan juga pertanggungjawaban laporan keuangan masih memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai aplikasi pendamping dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pada pemerintahan daerah, sumber daya manusia yang bekerja masih banyak yang tidak sesuai dengan mutu dan kualitas pekerjaannya.

Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan pekerjaannya akan semakin mendukung ketepatan waktu penyajian hasil pekerjaannya, termasuk informasi keuangan (Wati, Herawati, & Sinarwati, 2014). Menurut (Kurnia, 2017) laporan keuangan daerah akan berkualitas jika dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian (Chodijah & Hidayah, 2018) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut (Pilander, Saerang, & Gamaliel, 2018) kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Dari hasil penelitiannya dinyatakan penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut (Darmawan & Darwanis., 2018) hasil penelitian mereka menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi memiliki korelasi positif dan berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil beberapa penelitian di atas, menarik untuk diteliti lebih lanjut kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Bukittinggi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh, ketiga variabel terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi”

B. TELAAH LITERATUR

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengertian sumber daya manusia menurut Darno (2012) adalah orang-orang yang siap, mempunyai keinginan dan mampu untuk berkontribusi dalam tujuan organisasi. Menurut Gouzali dalam Kadarisman (2012) Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk pengelolaan keuangan daerah yang baik harus melibatkan sumber daya manusia yang kompeten dan didukung oleh latar belakang pendidikan akuntansi dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan dan sosialisasi tentang keuangan. Sehingga terhindar dari kesalahan pembuatan laporan keuangan dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang diterapkan pemerintah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software, database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Ridha, 2016). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Salah satu sistem informasi berbasis teknologi computer atau website di pemerintah Kota Bukittinggi adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan sebagai aplikasi pendampingnya adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah. Menurut (Subrata et al., 2018) manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah adalah kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan menjadi lebih tepat waktu, dapat menyimpan data dalam jumlah data yang besar, meminimalisasi terjadinya kesalahan sehingga lebih akurat dalam perhitungan, dan biaya pemrosesan yang lebih murah. Teknologi informasi yang dimanfaatkan dengan baik dan tepat akan dapat meningkatkan kualitas laporan barang milik daerah yang terwujud dengan terciptanya laporan yang andal, akurat dan tersedia secara tepat waktu

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah tersebut telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam

rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Tujuan adanya SIPD adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah. Dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini diatur dalam Permendagri 90 tahun 2019 dikuatkan lagi dengan Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

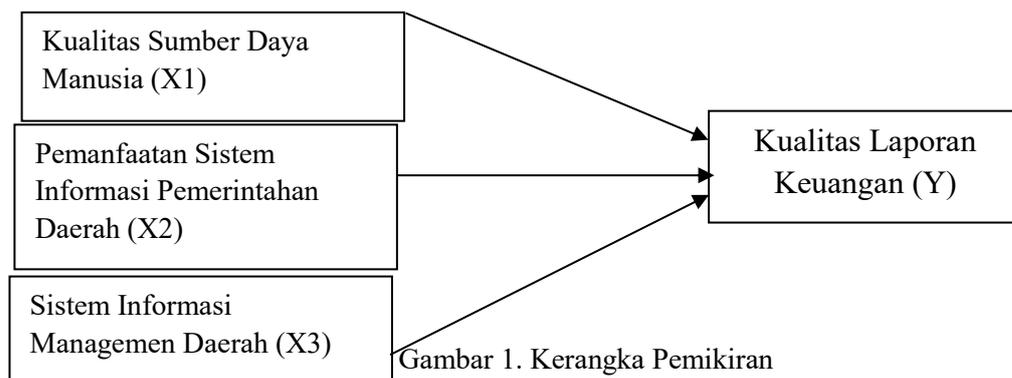
Untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka tahun 2003 Deputi pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah dengan tujuan membantu pemerintah daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai. Sistem Informasi Manajemen Daerah ini menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan seluruh pemangku kepentingan.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, memberikan pengertian laporan keuangan adalah “Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Kualitas” adalah “tingkat baik buruknya sesuatu kadar derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya) atau mutu. Jadi kualitas laporan keuangan adalah “derajat atau mutu laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan yakni pemerintah daerah dalam periode satu tahun.”

Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Anggun (2016) menyatakan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan Keuangan, yaitu semakin tinggi Kompetensi Sumber daya manusia maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat. Fontanella (2010) mengatakan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang bermanfaat, maka dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu elemen yang sangat penting. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat dikemukakan hipotesa :

H1 : Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi

Pengaruh Sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Pemda dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sistem pengendalian intern dengan menggunakan kendali komputer, selain itu Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat meningkatkan akurasi dari informasi (Yosefrinaldi 2013). Maka berdasarkan penelitian sebelumnya dapat dikemukakan hipotesa :

H2 : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi

Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.

SIMDA berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dengan menggunakan SIMDA dalam mengelola keuangan daerah dapat membantu meningkatkan kinerjanya dan individu yakin dalam menggunakan sistem akan membantu dia mencapai keuntungan dalam pekerjaannya (Ananda, 2019). Maka berdasarkan penelitian terdahulu dapat dikemukakan hipotesa :

H3 : Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner. Butir pertanyaan dan pilihan jawaban dalam kuesioner disesuaikan dengan variabel-variabel yang akan diukur. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer dan data sekunder.

Populasi diambil dari Bagian Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi terdiri dari 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Metode penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah Kasubbag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah, Staf Penatausahaan Keuangan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

Variabel dalam penelitian ini yaitu (1) variabel dependen (2) variabel independen. Variabel dependen adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y) dan variabel independennya Kapasitas Sumber Daya manusia (X1), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (X2) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (X3).

Untuk dapat mengukur sikap, pendapat dan persepsi dari responden menggunakan skala Likert dengan instrumen berupa kuesioner dengan tingkatan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|----------|
| a. Sangat Setuju (SS) | skor = 5 |
| b. Setuju (S) | skor = 4 |

- c. Kurang Setuju (KS) skor = 3
- d. Tidak Setuju (TS) skor = 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) skor = 1

Metode Analisa Data

Analisis deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian. Dilakukan dengan cara menyajikan data primer ke dalam tabel distribusi frekuensi, menghitung skor total, skor rata-rata dan tingkat capaian responden (TCR). Tahap pertama dilakukan perhitungan terhadap skor total dari jawaban responden untuk setiap item pernyataan. Adapun rumus untuk menentukan besarnya skor total adalah sebagai berikut (Arikunto, 2012):

$$\text{Skor Total} = (\text{SS.f}) + (\text{S.f}) + (\text{KS.f}) + (\text{TS.f}) + (\text{STS.f}) \dots\dots\dots (1)$$

Selanjutnya dihitung rata-rata skor masing-masing variabel (Arikunto, 2012):

$$\text{Rata-rata Skor} = (\text{Skor Total} / n) \dots\dots\dots (2)$$

n = Jumlah Responden

Kemudian Tingkat Capaian Responden (TCR) dengan rumus (Arikunto, 2012):

$$\text{TCR} = (\text{Rata-Rata Skor} / 5) \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

Dalam menginterpretasikan nilai TCR yang diperoleh, maka dapat dipedomani tabel 1.berikut (Arikunto, 2012):

Tabel 1.
 Kriteria Tingkat Capaian Responden (TCR)

TCR (%)	Variabel dan Kriteria				
	Efektivitas Penerapan SAKIP	Pedoman Sakip	Komitmen Pemerintah	Budaya Kerja	Peran APIP
90 s/d 100	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
80 s/d 89,9	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
65 s/d 79,9	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
55 s/d 64,9	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik
0 s/d 54,9	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Baik

Sumber: Arikunto (2012) dan disesuaikan oleh Penulis

Uji Kualitas Instrumen

Pengujian kualitas instrument dan kelayakan data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Pengolahan instrumen menggunakan SEM-PLS.

Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. *Outer model* dengan indikator refleksif dievaluasi melalui *convergent validity* dan *discriminat validity* untuk indikator

pembentuk konstruk laten, serta melalui *composite reliability* dan *Cronbach alpha* untuk blok indikatornya (Chin, 1998 dalam Ghozali 2011).

Model Struktural (Inner Model)

Pengujian *inner model* dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk atau variabel laten, yang dilihat dari nilai *R-square* dari model penelitian dan juga dengan melihat besar koefisien jalur strukturalnya.

Model Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik untuk menunjukkan tingkat signifikansi. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96 melalui proses *bootstrapping*. Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah:

1. Jika $Sig > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak.
2. Jika $Sig < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima.

D. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini kuesioner disebarakan ke 28 SKPD sebanyak 84 eksemplar. Jumlah kuesioner yang kembali dan diisi oleh responden berjumlah 82 eksemplar (97.61 %). Berikut hasil rekapian tingkat capaian respon yang di peroleh dari jawaban kuesioner.

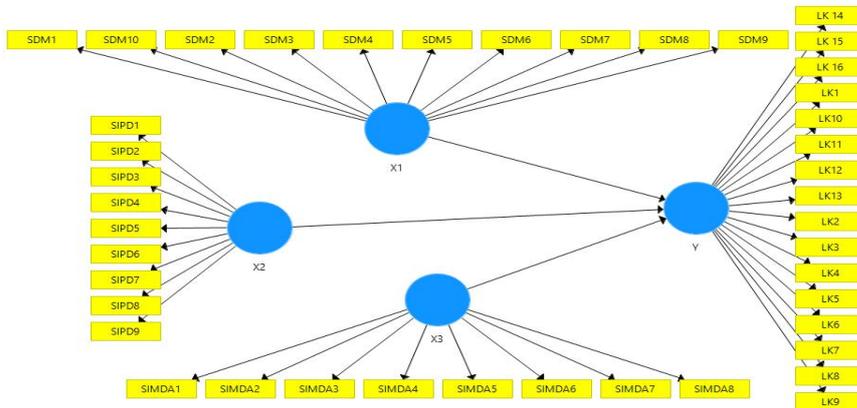
Tabel 2.
Rekap Hasil TCR

No.	Variabel	Rata – rata	TCR	Keterangan
1	Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	4,01	80,2	Baik
2	Sistim Informasi Pemerintahan (X2)	4,01	80,2	Baik
3	Sistim Informasi Manajemn Daerah (X3)	3.65	73.1	Cukup Baik
4	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	4.41	88.3	Baik

Sumber : Data Primer, Olahan Tahun 2022

Dari tabel menunjukkan skor rata-rata variabel paling tinggi pada penelitian ini terdapat pada Kualitas Laporan Keuangan (Y) dengan skor rata-rata 4,41 dan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 88,3 % masuk dalam kategori baik.

Hasil Olahan Data



Sumber : Hasil Olahan Data 2022

Gambar 2. Diagram Jalur

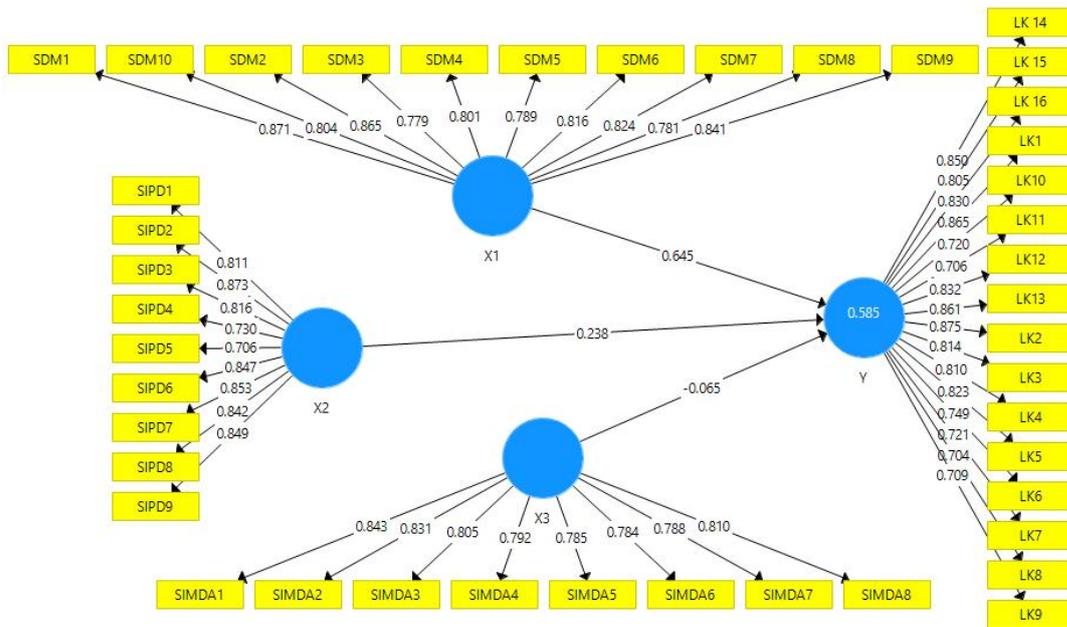
Berdasarkan diagram jalur diatas menggambarkan indikator dari masing-masing variabel. Kualitas laporan keuangan (Y) enam belas indikator, kapasitas sumber daya manusia (X1) sepuluh indikator, sistem informasi pemerintahan daerah (X2) sembilan indikator, dan sistem informasi manajemen daerah (X3) delapan indikator. Analisis ini digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh masing – masing variable independen terhadap variable dependen.

Uji Outer Model (*Measurement Model*)

Hasil uji validitas dan reliabilitas dijelaskan sebagai berikut:

Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen dapat dicapai dengan dua cara yaitu melalui pencapaian kriteria dan melalui uji perbandingan model. Pada penelitian ini validitas konvergen dibuktikan melalui pencapaian kriteria. Dalam pendekatan SEM-PLS, sebuah pengukuran telah memenuhi validitas konvergen apabila telah memenuhi syarat yaitu memiliki loading faktor minimal 0,6. Hasil loading faktor dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini:



Hasil Olahan Data 2022

Gambar 3. Diagram Jalur Nilai Loadings Faktor

Hasil diagram jalur diatas menunjukkan semua indikator mempunyai faktor loading diatas dari 0,6. Berarti dapat dilakukan untuk pengujian selanjutnya. Indikator yang memiliki nilai di bawah 0,6 tidak ada dan memiliki validitas konvergen yang baik. Dengan demikian, indikator valid dalam mengukur masing-masing variabel latennya.

Uji Diskriminan Validity

Uji validitas diskriminan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan nilai validitas suatu variabel bila dibandingkan dengan variabel lainnya. Pada pengujian *discriminant validity* dapat dilihat menggunakan output pengujian AVE, Crossloading dan *latent variable correlation*. Berikut hasil output uji diskriminan validity :

Tabel 3.
 Diskriminan Validity Variabel Laten dengan Nilai AVE

Construct Reliability and Validity				
Matrix	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted ...
	Cronbach's Al...	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1	0.946	0.965	0.953	0.669
X2	0.937	0.948	0.947	0.665
X3	0.928	0.967	0.936	0.648
Y	0.960	0.961	0.965	0.631

Hasil Olahan Data 2022

Pengukuran validitas diskriminan dilihat melalui nilai AVE (*Average Variance Extracted*). Dimana nilai AVE harus lebih besar 0.60, yang berarti seluruh variabel laten mempunyai validitas diskriminan yang baik. Jika nilai AVE di bawah 0.6 berarti variabel laten tidak memiliki validitas diskriminan yang baik atau variabel tidak valid. Hasil penelitian didapat nilai AVE setiap variabel dalam penelitian ini lebih besar dari 0.60 ini berarti seluruh variabel laten dalam penelitian ini mempunyai validitas diskriminan yang baik.

Cross loading

Cross loading setiap indikator harus memiliki *loading* lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur, dibandingkan dengan indikator untuk variabel laten lainnya. Hasil *output* dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Korelasi masing-masing indikator terhadap variabelnya memiliki nilai lebih tinggi daripada korelasi indikator tersebut dengan variabel lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pada setiap variabel memiliki tingkat *discriminant validity* yang baik.

Tabel 4.
 Diskriminan Validity Variabel Laten dengan Cross Loading

Discriminant Validity				
Cross Loadings				
Matrik	Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	Sistim Informasi Pemerintahan (X2)	Sistim Informasi Manajemn Daerah (X3)	Kualitas Laporan Keuangan (Y)
LK 1	0.670	0.418	0.321	0.865
LK 2	0.590	0.379	0.291	0.875
LK 3	0.559	0.380	0.311	0.814
LK 4	0.547	0.306	0.290	0.810
LK 5	0.578	0.475	0.243	0.823
LK 6	0.603	0.505	0.312	0.749
LK 7	0.573	0.535	0.228	0.721
LK 8	0.537	0.536	0.194	0.704
LK 9	0.553	0.528	0.204	0.709
LK 10	0.478	0.524	0.130	0.720
LK 11	0.464	0.484	0.077	0.706
LK 12	0.605	0.427	0.246	0.832
LK 13	0.646	0.386	0.293	0.861
LK 14	0.593	0.316	0.240	0.850
LK 15	0.670	0.307	0.275	0.805
LK 16	0.659	0.359	0.302	0.830
SDM 1	0.871	0.438	0.323	0.818
SDM 2	0.865	0.445	0.312	0.839
SDM 3	0.779	0.346	0.423	0.548
SDM 4	0.801	0.280	0.539	0.551
SDM 5	0.789	0.263	0.497	0.482
SDM 6	0.816	0.507	0.215	0.607
SDM 7	0.824	0.476	0.273	0.508
SDM 8	0.781	0.449	0.255	0.455
SDM 9	0.841	0.510	0.365	0.498
SDM 10	0.804	0.494	0.407	0.465
SIPD 1	0.491	0.811	0.506	0.523

SIPD 2	0.480	0.873	0.469	0.545
SIPD 3	0.385	0.816	0.387	0.449
SIPD 4	0.374	0.730	0.553	0.310
SIPD 5	0.346	0.706	0.485	0.283
SIPD 6	0.474	0.847	0.221	0.449
SIPD 7	0.396	0.853	0.186	0.427
SIPD 8	0.406	0.842	0.209	0.456
SIPD 9	0.383	0.849	0.191	0.429
SIMD 1	0.357	0.385	0.843	0.375
SIMD 2	0.301	0.407	0.831	0.300
SIMD 3	0.299	0.261	0.805	0.137
SIMD 4	0.303	0.230	0.792	0.110
SIMD 5	0.280	0.258	0.785	0.064
SIMD 6	0.406	0.383	0.784	0.205
SIMD 7	0.318	0.309	0.788	0.253
SIMD 8	0.458	0.346	0.810	0.244

Hasil Olahan Data 2022

Dari hasil *cross loading* untuk diskriminan validity di peroleh hasil dimana nilai *cross loading* dari indikator Kualitas Laporan Keuangan (LK1) terhadap 16 indikator kualitas laporan keuangan sebesar 0,865 lebih besar daripada nilai *cross loading* kualitas laporan keuangan (LK1) dengan variable Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistim Informasi Pemerintah Daerah dan Sistim Informasi Manajemen daerah yaitu 0.670, 0.418, 0.321. Begitu juga pada indikator lainnya semua nilai *cross loading* indikator dengan variabelnya lebih besar daripada *crossloading* dengan variabel lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pada semua variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat *discriminant validity* yang baik.

Latent Variable Correlation

Salah satu cara untuk melakukan pengukuran validitas diskriminan adalah dengan membandingkan nilai akar kuadrat dari *average variance extracted* (AVE) yang diperoleh melalui nilai korelasi antar variabel (Hair *et al.*, 2011). Apabila nilai akar kuadrat *average variance extracted* (AVE) variabel laten lebih besar dari 0,7 dan lebih besar dari nilai korelasi dengan seluruh variabel laten lainnya maka dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik. Untuk melihat nilai akar kuadrat *average variance extracted* (AVE) variabel laten dapat dilihat pada kolom *Fornell – Larcker Criterion* dibawah ini:

Tabel 5.
 Diskriminan Validity Variabel Laten dengan
 Fornell - Larcker Criterion

Fornell – Larcker Criterion				
Matrix				
	Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	Sistem Informasi Pemerintahan (X2)	Sistem Informasi Manajemn Daerah (X3)	Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	0.818			

Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (X2)	0.514	0.816		
Sistim Informasi Manajemen Daerah (X3)	0.432	0.427	0.805	
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.739	0.541	0.314	0.795

Hasil Olahan Data 2022

Tabel diatas menunjukkan nilai akar kuadrat AVE pada variabel kapasitas sumber daya manusia sebesar 0.818. Nilai tersebut lebih besar dari nilai korelasi antara kapasitas sumber daya manusia dengan variabel lainnya. Nilai akar kuadrat AVE pada variabel sistim informasi pemerintahan daerah sebesar 0.816. Nilai tersebut lebih besar dari nilai korelasi antara variabel laten lainnya. Nilai akar kuadrat AVE pada variabel sistim informasi manajemen daerah sebesar 0.805. Dengan demikian nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari nilai korelasi antar variabel dengan variabel lainnya. Artinya bahwa seluruh variabel laten dalam penelitian ini mempunyai validitas diskriminan yang baik.

Composite Reliability

Kelompok Indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki reliabilitas komposit $\geq 0,7$ meskipun bukan standar absolut. Hasil reliabilitas komposit dipaparkan pada Tabel berikut :

Tabel 6.
 Nilai Reliabilitas Masing-Masing Variabel Penelitian

	Cronbach's Al...	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1	0.946	0.965	0.953	0.669
X2	0.937	0.948	0.947	0.665
X3	0.928	0.967	0.936	0.648
Y	0.960	0.961	0.965	0.631

Hasil Olahan Data 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai reliabilitas komposit seluruh variabel laten berkisar antara 0,936 sampai dengan 0,965 artinya bahwa keseluruhan nilai reliabilitas komposit lebih besar dari 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel laten mempunyai reliabilitas komposit yang baik.

Uji Inner Model (Structural Model)

Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. *Inner Model* diukur menggunakan *R-square* variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi; *Q-Square predictive relevance* untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai *Q-square* > 0 menunjukkan model memiliki *predictive relevance*; sebaliknya jika nilai *Q-Square* ≤ 0

menunjukkan model kurang memiliki *predictive relevance*. Menurut Hair et al (2014) nilai Q-square 0.35 berarti model tergolong kuat, 0,15 model tergolong sedang, dan 0,02 berarti model tergolong lemah. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-Square* untuk konstruk dependen, nilai koefisien *path* atau *t-value* tiap *path* untuk tingkat nyata dalam pengujian hipotesis. Semakin tinggi nilai *R-Square* berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan (Jogiyanto 2011). *Inner model* bertujuan untuk melihat hubungan antar konstruk laten. Pengujian model struktural (*inner model*) dilakukan melalui:

Pengujian R-square

Hasil uji R Square digunakan untuk melihat kontribusi dari variable independen terhadap variable dependen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8. berikut ini:

Tabel 7. Nilai R²

R Square Matrix	R Square	R Square Adjustive
Laporan Keuangan	0.585	0.568

Hasil Olahan Data 2022

Berdasarkan hasil pengolahan data nilai R² yang tertera pada output di atas dapat dijelaskan bahwa variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel kapasitas sumber daya manusia, sistim informasi pemerintahan daerah dan sistim informasi manajemen daerah sebesar 0.568 atau 56,8 persen sisanya 43,2 persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pengujian Q-square

Pengujian Q Square digunakan untuk melihat hubungan antara variable eksogen dengan varuabel endogen atau untuk melihat hubungan variable independen dengan variable dependen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.
 Nilai Q-square

Construct Crossvalidated Redundancy					
Total	Case1	Case2	Case3	Case4	Case5
	SSO	SSE	Q ² (= 1-SSE/SSO)		
X1	810.000	810.000			
X2	729.000	729.000			
X3	648.000	648.000			
Y	1296.000	832.679			0.358

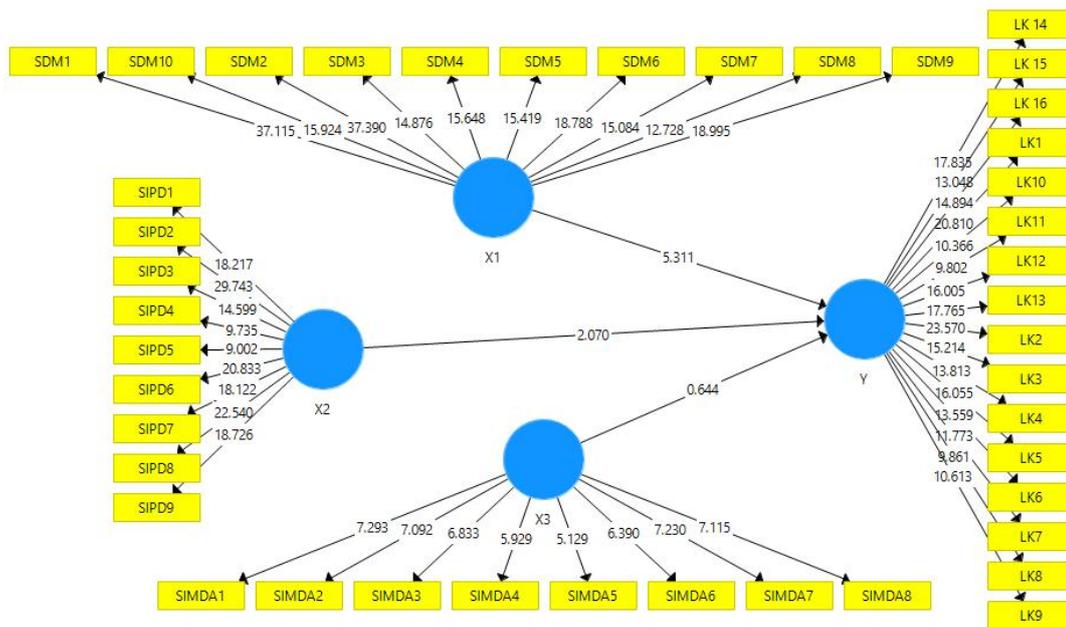
Hasil Olahan Data 2022

Berdasarkan tabel diatas nilai Q-square sebesar 0.358 yang artinya kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi pemerintahan daerah dan sistem informasi manajemen daerah memprediksikan

kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi tergolong kedalam kategori sangat kuat, yang berarti menunjukkan bahwa model memiliki predictive relevance yang sangat baik.

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis ini merupakan analisis kausalitas yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisis kausalitas dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Variabel eksogen dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen jika nilai t statistik > t table (1,96) dan nilai P-value < alpha 0.05. Hasil uji hipotesis dipaparkan pada gambar 4 dan Tabel .10 sebagai berikut.



Gambar 4. Diagram Jalur Hasil Hipotesis

Tabel 9.
 Hasil Path Coefficient Model

Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Devia...	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1 -> Y	0.645	0.630	0.121	5.311	0.000
X2 -> Y	0.238	0.240	0.115	2.070	0.039
X3 -> Y	-0.065	-0.030	0.101	0.644	0.520

Hasil Olahan Data 2022

Keterangan:

1. Nilai Original sample sebesar 0,645 maka Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Setiap peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia satu satuan, akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar 0,645 satuan. Semakin tinggi Kapasitas Sumber Daya Manusia, maka semakin tinggi Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Nilai t statistik sebesar 5.311 lebih besar dari t tabel (1,96) dan p-value $0.000 < \alpha 0.05$, maka Terima H_1 tolak H_0 artinya Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan.
2. Nilai original sample sebesar 0,238 maka Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Setiap peningkatan sistem informasi pemerintahan daerah satu satuan, akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar 0,238 satuan. Nilai t statistik sebesar 2.070 lebih besar dari t tabel (1,96) dan p-value $0.039 < \alpha 0.05$, maka Terima H_1 tolak H_0 artinya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh signifikan.
3. Nilai original sample sebesar -0,065 maka Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Setiap peningkatan Sistem Informasi Manajemen Daerah satu satuan, akan menurunkan Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar -0,065 satuan. Nilai t statistik sebesar 0.644 lebih kecil dari t tabel (1,96) dan p-value $0.520 > \alpha 0.05$, maka terima H_0 tolak H_1 artinya Sistem Informasi Manajemen Daerah tidak signifikan.

Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Hasil hipotesa pertama menunjukkan variable Kapasitas Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ponamon, 2014) dengan judul “Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem akuntansi keuangan, Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah kota manado” Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan pengaruh yang positif.

Hipotesa kedua diterima karena Sistem Informasi Pemerintah Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lucki & Suhartono, 2019) dengan judul “Analisis Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” Dari hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang positif.

Hipotesa ketiga ditolak karena Sistem Informasi Manajemen Daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan & Darwanis., 2018) dengan judul “Pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPA Provinsi Aceh” Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan pengaruh yang negative dan tidak signifikan.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia dan sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi, sedangkan sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Anggun, R. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Chodijah, S., & Hidayah, N. (2018). pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 34–48. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2595>
- Darmawan, A., & Darwanis. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumberdaya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPA Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(1), 9–19.
- Darno. 2012. Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 1, No. 1, Semester Ganjil 2012/2013.
- Fontanella, A. 2010. Aplikasi Komputer Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok. *jurnal akuntansi Politeknik Negeri Padang*, Padang
- Kurnia, D. (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Вестник Росэдравнадзора*, 4, 9–15.
- Lucki, B. M., & Suhartono, E. (2019). analisis pengaruh sistem informasi keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Dinas Pemerintahan Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(November 2019), 177–188.
- Nasir, A., & Oktari, R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi*, 19(02), 1–14.
- Republik Indonesia 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah..
- Republik Indonesia 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pilander, S. M., Saerang, D. P., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 9(2), 128–139. <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i2.26468>

- Ponamon, I. F. (2014). Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Skpd Pemerintah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 68–80. <https://doi.org/10.32400/gc.9.2.5060.2014>
- Ridha. M., Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, PengendalianIntern Akutansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis AkruaI. Tesis. Program Studi Magister Akutansi. Universitas Andalas
- Subrata, I. W., Yasa, G. W., & Astika, I. B. P. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan Barang Milik Daerah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2, 477. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i02.p07>
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–11.